

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara Sedang Berkembang (NSB) yang kaya akan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Namun sebagian wilayah yang ada di Indonesia termasuk di daerah Provinsi Banten rakyatnya masih tergolong miskin. Kemiskinan di Indonesia terjadi karena dilatarbelakangi oleh banyak hal, antara lain yaitu kesempatan kerja yang kurang menyebabkan masyarakat sulit mencari pekerjaan, untuk sekedar mengentaskan dirinya dari kemiskinan banyak juga yang mempunyai pekerjaan namun upah yang diterima tidak cukup.

Sumber daya manusia yang masih dibawah standar juga melatar belakangi masalah kemiskinan ini, masyarakat miskin tidak mempunyai keahlian khusus karena tidak berpendidikan ataupun tidak pernah mengikuti pelatihan tertentu, selain itu pengalaman masyarakat miskin juga tidak banyak. Hal itu tentu mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Program ekonomi yang dijalankan di Negara Sedang Berkembang (NSB), termasuk Indonesia sering berorientasi kepada peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) semata. “Berdasarkan data pada BPS jumlah penduduk miskin perdesaan di Provinsi Banten pada September 2016 mencapai

657,74 ribu jiwa”.<sup>1</sup> Indikator dari kemiskinan adalah tingkat konsumsi beras perkapita pertahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), dan tingkat kesejahteraan.

Jika mengacu pada ISIC (International Standar Industrial Classification), terdapat 11 sektor yang menjadi sumber perhitungan PDB yaitu sektor produksi pertanian, sektor produksi pertambangan dan penggalian, sektor produksi industri manufaktur/pengolahan, sektor produksi listrik, gas, dan air minum, sektor produksi bangunan, sektor produksi perdagangan, hotel dan restoran, sektor produksi transportasi dan komunikasi, sektor produksi bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor produksi sewa rumah, sektor produksi pemerintahan dan pertahanan, dan sektor produksi jasa lainnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peranan penting terhadap perkembangan ekonomi warga, terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan dan penanggulangan kemiskinan misalnya yang terdapat di Desa Bumijaya Kabupaten Serang yang sudah terkenal dengan usaha kerajinan gerabahnya. Usaha mikro kecil pun mampu membuktikan ketahanannya sebagai landasan perekonomian Indonesia dalam menghadapi perubahan kondisi pasar yang cepat, hal ini dikarenakan berlandaskan pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga tidak terpengaruh dengan adanya krisis.<sup>2</sup>

Salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan cara memberdayakan usaha yang dijalankan masyarakat

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Banten*, <http://www.BPS.Provbanten.com> 2016. (Diakses 3 Januari 2017)

<sup>2</sup>Kusmuljono, *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha*, (Jakarta: Angkasa, 2009), 46.

dengan akses pembiayaan tanpa jaminan, yang mudah, efektif dan efisien. “Hal ini karena, hal utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendirikan sebuah usaha adalah permodalan”.<sup>3</sup> Begitu juga dengan usaha kerajinan gerabah ini yang membutuhkan modal untuk memberdayakan usaha yang dijalankan masyarakat di Desa Bumijaya.

Proses akan berjalan optimal jika berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kesetaraan gender, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan milenium di Indonesia yakni mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kerajinan gerabah Desa Bumijaya adalah kerajinan rakyat yang sudah berlangsung sejak lama, masyarakat di Desa Bumijaya memiliki keahlian membuat gerabah yang sudah diwariskan secara turun temurun hingga saat ini, hampir semua penduduk perempuan di Desa Bumijaya warga masyarakatnya rata-rata berprofesi sebagai pengrajin gerabah terutama ibu-ibu.

Di Desa Bumijaya Pasar Dukuh Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang merupakan sentra industri kerajinan gerabah di Banten. Motif hias dari kerajinan gerabah Bumijaya mengadopsi motif gerabah peninggalan sejarah Banten sebagai salah satu ciri khas daerah dan salah satu cara melestarikan budaya Banten. Kerajinan gerabah Bumijaya dibuat dengan teknik pelintir atau pilin dan teknik cetak.

---

<sup>3</sup>Samsir Rambe, *Manajemen Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, (Bandung: 1994), 25.

Produk yang dihasilkan dari Bumijaya diantaranya air mancur, guci besar, pot besar, vas bunga, asbak, meja, kursi, patung binatang, Menara Banten dan jumlah yang paling banyak diproduksi adalah kowi (tempat membakar logam emas) dan motif-motif yang diambil dari nama-nama yang berhubungan dengan sejarah Banten.

Maka dari itu pemerintah Indonesia mencanangkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri. UPK Ciruas berdiri pada tanggal 2 Agustus 2009 melalui MAD III Program UPK Mandiri Perdesaan dengan jumlah 3 orang pengurus yaitu : Subhanuddin S.E : Ketua, Jahidin : Sekretaris, Dewi Asih Farisanti : Bendahara

Selain pengurus diatas Kecamatan Ciruas juga di dampingi oleh pelaku lainnya : Abdullah S.Sos, M.Si (Camat Ciruas), Kusyaman S.Pd, M.Pd (PJOK), Dian Lestari S.Pd (Fasilitator Kecamatan), Roy Martinus ST (Fasilitator Tehnik), H. Syahroni (Ketua BKAD), Ade Faisal S.E (Sekretaris BKAD), Daris Suantana (Ketua BP UPK), Nurhasim (Sekretaris BP UPK), H.Suanda S.E (Bendahara BP UPK), Akbar (Pendamping Lokal).

Kantor UPK saat ini masih menumpang di Kantor Kecamatan Ciruas tepatnya di Jalan Raya Jakarta – Serang Km. 09 Desa Citerep. Kecamatan Ciruas merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan jumlah desanya mencapai 16 desa, meliputi : Desa Citerep, Desa Ciruas, Desa Ranjeng, Desa Singamerta, Desa Pulo, Desa Ciruas, Desa Kadikaran, Desa Kepandean, Desa Gosara, Desa Kebonratu, Desa Tirem, Desa Bumijaya, Desa Pamong, Desa Cigelam, Desa Kaserangan, dan Desa Beberan.

Kecamatan Ciruas merupakan salah satu kecamatan sasaran penerima Program dalam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Perdesaan mulai tahun anggaran 2009, dengan jumlah alokasi biaya yang dikucurkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan dana stimulan untuk Kecamatan Ciruas sebesar Rp. 110.345.000,- terdiri dari Rp. 84.800.000,- (DOK Perencanaan) dan Rp. 25.545.000,- (DOK Pelatihan Masyarakat), dengan skema pendanaan terdiri dari Rp. 1.600.000.000,- dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN dan Rp. 400.000.000 merupakan dana *Cost Sharing* dari Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang. Melalui proses tahapan PNPM-MP dana tersebut akhirnya diputuskan dalam kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) pendanaan di tingkat kecamatan dan ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC), teralokasi untuk kegiatan di 14 desa.

Adanya pinjaman bergulir UPK ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat menuju kemandirian dengan pembangunan dalam pelaksanaannya dari, oleh dan untuk rakyat. Alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) UPK 80% bersumber dari APBN dan 20% dari APBD.

Pinjaman bergulir UPK merupakan program percepatan penanggulangan kemiskinan di perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan mengenai pemberdayaan masyarakat yang merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan yaitu PNPM yang telah berlangsung sekitar tahun 2009.<sup>4</sup>

Pinjaman bergulir UPK, khususnya di Desa Bumijaya secara garis besar terbagi kedalam tiga jenis kegiatan yaitu kegiatan

---

<sup>4</sup> Ratnaningsih, *Modul Panduan PNPM Mandiri Pedesaan*, (Jakarta: 2000), 15.

infrastruktur, simpan pinjam khusus perempuan dan kegiatan peningkatan kapasitas usaha ekonomi produktif. Salah satu kegiatan pinjaman bergulir UPK yang memberikan fasilitas kredit yang mudah untuk meningkatkan ekonomi warga dengan memfokuskan pada pemberdayaan perempuan adalah simpan pinjam khusus perempuan. Keharusan individu berkelompok dengan individu yang lainnya dalam memperoleh pinjaman menyebabkan terciptanya mekanisme kontrol antara anggota satu dengan anggota yang lainnya dalam sebuah kelompok.

Dari uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian bahwasannya banyak dampak positif ataupun negatifnya dari hasil pinjaman bergulir UPK tersebut, terutama bagi kesejahteraan masyarakat yang membangun usaha kerajinan gerabah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, penulis pada penelitian ini mengambil judul : **“Pengaruh Pinjaman Bergulir UPK Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pengrajin Gerabah”**. (Studi di Desa Bumijaya Pasar Dukuh Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pinjaman bergulir UPK mengalami masalah klasik yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah yang terjadi dalam hal simpan pinjam, salah satunya yaitu terjadinya keterlambatan pengembalian dikarenakan berbagai hal,

biasanya disebabkan usaha kurang lancar sehingga tidak bisa membayar angsuran.

2. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan pengrajin gerabah di Desa Bumijaya dilihat dari teori ekonomi syariah yaitu pendapatan.
3. Untuk kesejahteraan masyarakat pengrajin gerabah yang ada di Desa Bumijaya kelompok peminjaman dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
4. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat miskin khususnya pengrajin gerabah dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat ruang lingkup permasalahan dan dengan mempertimbangkan waktu serta pengetahuan penulis, pembatasan masalah ditetapkan agar tujuan penelitian tidak menyimpang dari sasarannya dan agar tidak salah persepsi serta dapat pembahasan yang terarah maka perlu adanya pembatasan masalah.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pinjaman bergulir UPK untuk perempuan terhadap peningkatan kesejahteraan pengrajin gerabah di Desa Bumijaya. Untuk mengukur peningkatan kesejahteraan pengrajin gerabah dilihat dari teori ekonomi syariah yaitu pendapatan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pinjaman bergulir UPK terhadap peningkatan kesejahteraan pengrajin gerabah di Desa Bumijaya Pasar Dukuh Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ?
2. Bagaimana pinjaman bergulir UPK terhadap peningkatan kesejahteraan pengrajin gerabah menurut perspektif ekonomi Islam ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pinjaman bergulir UPK terhadap peningkatan kesejahteraan pengrajin gerabah di Desa Bumijaya Pasar Dukuh Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui pinjaman bergulir UPK terhadap peningkatan kesejahteraan pengrajin gerabah menurut perspektif ekonomi Islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan pinjaman bergulir UPK khusus perempuan yaitu :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai upaya

penanggulangan kemiskinan melalui pinjaman bergulir UPK khusus perempuan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

## 2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan acuan data awal untuk mendapatkan data-data lainnya yang lebih komprehensif di dalam penelitian masalah yang sama atau penelitian yang bersinggungan dengan pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam penelitian ini.

## 3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat khususnya kaum perempuan diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai manfaat adanya pelaksanaan pinjaman bergulir UPK Mandiri Perdesaan khusus perempuan sebagai langkah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan.

## 4. Bagi Pengrajin Gerabah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang solutif dan bermanfaat bagi pengrajin gerabah dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini diharapkan juga bisa memberikan masukan masyarakat lokal untuk meningkatkan ekonomi dalam pengembangan industri gerabah.

## 5. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan menyusun kebijakan untuk pengembangan atau penyaluran dana pinjaman

bergulir UPK kelompok perempuan dan mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

#### 6. Bagi Fasilitator

Bagi fasilitator desa dapat dijadikan sebagai masukan dalam memaksimalkan pelaksanaan pinjaman bergulir UPK khusus perempuan.

### **G. Kerangka Pemikiran**

#### **1. Pinjaman Bergulir UPK**

Seiring dengan berkembangnya kegiatan ekonomi, kebutuhan manusia pun semakin berkembang. Begitu pula kebutuhan akan pendanaan untuk memenuhi kebutuhannya pun semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga informal maupun lembaga formal. “Namun masyarakat lebih memilih lembaga formal seperti pinjaman bergulir UPK karena proses peminjaman yang cukup mudah.”<sup>5</sup>

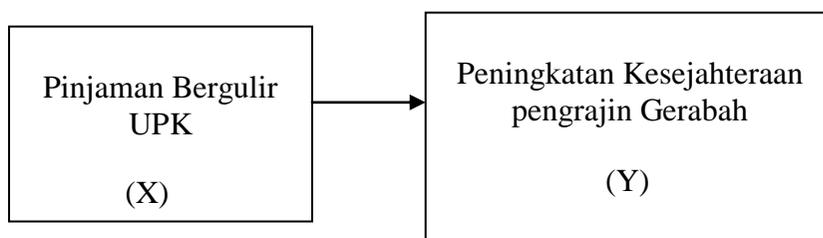
Produktivitas atau efektifitas pinjaman bergulir UPK merupakan ketersediaan pilihan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang usaha sehingga mendapatkan tambahan pendapatan. Pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah alokasi dana untuk simpan pinjam khusus perempuan dikendalai oleh jumlah alokasi dana untuk pembangunan sarana dan

---

<sup>5</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 8.

prasarana. Semakin besar proporsi dana untuk fasilitas sarana dan prasarana, maka semakin kecil ketersediaan dana untuk kegiatan simpan pinjam khusus perempuan. Sedangkan keputusan pembiayaan simpan pinjam khusus perempuan ditentukan oleh kelayakan proposal yang diajukan oleh setiap kegiatan simpan pinjam khusus perempuan. “Penyaluran kredit kepada pelaku UMKM secara kelompok merupakan salah satu cara untuk mengurangi kesalahan penggunaan kredit (moral hazard) dan mengurangi resiko bermasalah”.<sup>6</sup>

**Bagan 1.1**  
**Metode Penelitian**



Sumber : Penulis skripsi Dita Ariyani

Keterangan : Berdasarkan bagan diatas peningkatan kesejahteraan pengrajin gerabah dapat dilihat dari seberapa produktivitas atau efektifitas pinjaman bergulir UPK yang akan menghasilkan kesejahteraan pengrajin pada suatu periode tertentu.

---

<sup>6</sup>Ismawan, *Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan UMKM*, (Grasindo Jakarta: 2001), 2.

## 2. Teori Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

“Peningkatan adalah proses atau cara untuk meningkatkan usaha.”<sup>7</sup> Jadi, peningkatan merupakan suatu proses yang dimana proses tersebut memberikan hasil terhadap usaha yang dilakukan seseorang menjadi lebih meningkat. Sedangkan kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sansekerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun batin. Banyak pengertian kesejahteraan sosial yang dirumuskan, baik oleh para pakar pekerjaan sosial institusi, diantaranya:

Friedlander dalam Fahrudin, Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai. Lebih lanjut dijelaskan oleh Fahrudin bahwa, kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Dalam hal pengertian kesejahteraan sosial sebagaimana dijelaskan oleh UU No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Melengkapi pendapat diatas sebagaimana dijelaskan oleh Suharto (2010), kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu

---

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 28 Oktober 1998), 951.

: (1) kondisi kehidupan sejahtera; (2) institusi pelayanan sosial; (3) aktivitas yang terorganisir untuk kesejahteraan.<sup>8</sup>

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial.<sup>9</sup>

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Di Indonesia kesejahteraan sosial dijamin oleh UUD 1994 pasal 33 dan 34. Dalam UUD 1994 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

---

<sup>8</sup>Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

<sup>9</sup>Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Rafika Aditama, 2010), 3.

“Kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam sila kelima Pancasila yaitu kesejahteraan lahir batin, mengakui dan menghormati hak-hak warga negara serta tersedianya barang dan jasa sebagai keperluan hidup yang terjangkau.”<sup>10</sup>

Kondisi sejahtera terjadi apabila kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi. “Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, maka pendapatan perkapita dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat.”<sup>11</sup>

Sementara itu untuk mengukur tingkat kemiskinan, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan yang diukur dari kemampuan membeli bahan makanan ekuivalen dengan 2100 kalori per kapita per hari dan biaya untuk memperoleh kebutuhan minimal akan barang/jasa, pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Garis kemiskinan versi BPS tahun 2014 adalah pendapatan per kapita kurang Rp. 500.000 per bulan. “Sementara garis kemiskinan versi Bank Dunia adalah pendapatan perkapita US\$ 2 per hari (yang diukur dengan *Purchase Power Of Parity*).”<sup>12</sup>

Maka dari itu dalam penelitian ini, produktivitas atau efektifitas pinjaman bergulir UPK dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan pengrajin gerabah.

---

<sup>10</sup>Dipoyuda Kirdi, *Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 1 Keadilan Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1985), 10.

<sup>11</sup>Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan ...*, 104.

<sup>12</sup><http://www.dompetdhuafa.org>. (Diakses 6 Februari 2017)

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan dan pembahasan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, lalu penulis menjabarkan secara garis besar mengenai apa yang dikemukakan pada tiap-tiap bab yaitu :

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab pertama yaitu pendahuluan, yang dijadikan acuan dalam proses awal penelitian, di dalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai Teori Kebijakan Program UPK MP, Syarat Penerima SPP, Sistem Pembayaran Angsuran Dana Pinjaman, MAD Prioritas Usulan, MAD Penetapan Usulan, Prosedur Pemberian SPP UPK MP, Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, Tinjauan Tentang Kerajinan Gerabah, Tinjauan Tentang Usaha Peningkatan Kesejahteraan Pengrajin Gerabah Melalui Kegiatan UPK, Penelitian Terdahulu, Hipotesis.

### **Bab III : Metodologi Penelitian**

Pada bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian meliputi : Tempat dan Waktu penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data, Identifikasi

Variabel, Definisi Operasional Variabel, Uji Validitas dan Reliabilitas, dan Teknik Analisis Data.

#### Bab IV : Analisis Data

Pada bab keempat menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan meliputi : Gambaran Umum Objek Penelitian, Deskripsi Data, Analisis Data yang meliputi Analisis Deskriptif, Hasil Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis dan Pembahasan.

#### Bab V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.